

## INTISARI

Setelah reformasi di Indonesia, tata kelola kehutanan berubah dari government menjadi governance. Pemerintah lebih terbuka terhadap masukan dari aktor non pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Banyaknya aktor yang terlibat dalam proses kebijakan mempengaruhi kualitas kebijakan. Sering kali terjadi dalam proses kebijakan yang lebih menonjol adalah proses kontestasi, negosiasi dan dominasi antar aktor daripada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Untuk menstabilkan kepentingan dan kekuatan para aktor dibutuhkan suatu wadah kolaboratif multistakeholder, salah satunya adalah Dewan Kehutanan nasional (DKN). DKN sebagai organisasi inisiatif multistakeholder (MSI) mendorong tata kelola kehutanan yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses produksi kebijakan, masing-masing aktor sebagai perwakilan lembaga saling berhubungan untuk mencapai kepentingannya sebagai suatu proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana DKN sebagai organisasi multistakeholder mampu memfasilitasi keterlibatan, kepentingan, dan kekuasaan para aktor dalam proses kebijakan, sehingga dapat dianggap sebagai organisasi yang memiliki legitimasi dalam perspektif deliberatif. Pertanyaan penelitian terfokus pada bagaimana dinamika relasi kekuasaan antar aktor dalam DKN, bagaimana legitimasi input dan output DKN sebagai MSI, dan bagaimana karakteristik *salience*/arti penting para aktor dalam DKN.

Penelitian menggunakan pendekatan teori *Actor Centred Power* (ACP) untuk menganalisis dinamika relasi kekuasaan, analisis legitimasi input dan output untuk menganalisis legitimasi DKN, dan teori analisis *salience* stakeholder untuk menganalisis karakteristik para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan *indepth interview* terhadap 27 responden kunci perwakilan konstituen dari 5 kamar DKN. Observasi partisipan dilakukan dengan menghadiri rangkaian kongres yang diadakan DKN. Peneliti melengkapi wawancara dan observasi dengan analisis dokumen berupa: laporan, notulensi, buku-buku yang dihasilkan DKN, termasuk pernyataan-pernyataan aktor-aktornya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKN menghadapi permasalahan dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di antara para konstituennya. Masalah kelembagaan dan representasi kualitas konstituen mempengaruhi legitimasi input dan output DKN. DKN berhasil mencapai legitimasi input namun tidak pada legitimasi outputnya. Analisis *salience* stakeholder menunjukkan bahwa di dalam DKN konstituen pemerintah adalah stakeholder *definitive*, bisnis stakeholder *expectant* dengan tipologi *dangerous*. Konstituen LSM, akademisi merupakan stakeholder *latent* dengan tipologi *discretionary*, dan masyarakat stakeholder *latent* dengan tipologi *demanding* dalam memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan peran dan kinerja DKN sebagai MSI diperlukan penguatan kelembagaan organisasi terutama pada aspek status, struktur, aturan partisipasi, kapasitas konstituen, peran sekretariat, peningkatan arti penting stakeholder dan mengelola dominasi aktor.

Kata kunci: DKN, Kebijakan, Kepentingan, Kekuasaan, Organisasi Inisiatif Multipihak

## **ABSTRACT**

After the reform era in Indonesia, forest governance shifted from government to governance. The government became more open to inputs from non-governmental actors in the policy-making process. The involvement of numerous actors in the policy-making process influences the quality of policies. Often in the policy-making process, what stands out more is the contestation, negotiation, and domination among actors rather than the quality of the resulting policies. To stabilize the interests and power of various actors, a collaborative multistakeholder platform is needed, and one such example is the National Forestry Council (DKN). DKN, as a Multistakeholder Initiative (MSI) organization, promotes inclusive forestry governance by engaging various stakeholders. In the policy-making process, each actor, representing their respective institutions, interacts to pursue their interests in a political process. This research aims to understand the extent to which DKN as a multistakeholder organization is able to facilitate the involvement, interests, and power of actors in the policy process, so that it can be considered an organization that has legitimacy in a deliberative perspective. The research questions focus on how the dynamics of power relations between actors in DKN, how the legitimacy of DKN inputs and outputs as an MSI, and how the characteristics of salience/importance of actors in DKN.

The research used the Actor Centred Power (ACP) theory approach to analyze the dynamics of power relations, input and output legitimacy analysis to analyze DKN legitimacy, and stakeholder salience analysis theory to analyze the characteristics of stakeholders in decision making. Primary data collection was carried out by indepth interviews with 27 key respondents representing constituents from 5 DKN chambers. Participant observation was conducted by attending a series of congresses held by DKN. Researchers complemented interviews and observations with document analysis in the form of: reports, minutes, books produced by DKN, including statements of actors.

The results show that DKN faces problems in unbalanced power relations among its constituents. Institutional problems and quality representation of constituents affect DKN's input and output legitimacy. DKN managed to achieve input legitimacy but not output legitimacy. Stakeholder salience analysis shows that in DKN, government constituents are definitive stakeholders, expectant stakeholder businesses with dangerous typology. NGO constituents, academics are latent stakeholders with discretionary typology, and the community is a latent stakeholder with demanding typology in providing influence in the decision-making process. To improve the role and performance of DKN as an MSI, institutional strengthening of the organization is needed, especially in aspects of status, structure, participation rules, constituent capacitation, the role of the secretariat, increasing the importance of stakeholders and managing actor dominance.

**Keywords:** DKN, Policy, Interests, Power, Multistakeholder Initiative Organization